

PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN MELALUI PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Mutiari Fitri Dewi*¹, Frans Simon Dadiara²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia; e-mail: mutiar19@ipdn.ac.id

²Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku; Jl. Rijali No. 32 Kelurahan Karang Panjang Sirimau Kota Ambon, Indonesia; e-mail: frans.dadiara@gmail.com

*Correspondence

Received: 30-03-2022; Accepted: 28-06-2022 ; Published: 28-06-2022

Abstrak: Potensi perikanan Indonesia berperan penting dan strategis bagi pembangunan nasional karena memengaruhi aspek ekonomi, keamanan, ekologi dan sosial. Dengan peran penting ini, diharapkan taraf hidup nelayan Indonesia meningkat. Namun, data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan kelompok nelayan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Maluku Barat Daya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Lalu data dianalisis berdasarkan teori Pemberdayaan oleh Mardikanto dan Soebiato (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan meliputi tiga aspek yaitu bina manusia, bina usaha, dan bina kelembagaan. Ditemukan pula bahwa proses pemberdayaan masih belum optimal karena beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran kelompok nelayan, karakteristik nusantara, dan jaringan komunikasi yang belum memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perikanan telah melakukan upaya-upaya seperti memberikan pelatihan, pembagian alat tangkap, dan membentuk kelompok nelayan khusus. Saran yang dapat diberikan penulis adalah sosialisasi tentang kesadaran diri dan etos kerja, menjalin kerja sama dengan kepala desa, dan menerbitkan Perda terkait perikanan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Kelompok Nelayan, Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

Abstract: Indonesia's fisheries potential has an essential and strategic role for the national development since it influences economic, security, ecological and social aspects. With this important role, it is assumed that the living standard of Indonesia's fishermen improved. However, based on the data from the Ministry of Maritime Affairs (2018), most Indonesia's fishermen still live within the poverty line. This current study aims at describing the implementation of fishermen group empowerment through integrated marine and fisheries center program in Maluku Barat Daya District. The data of this study are gathered through direct observation, in-depth interview and documentation study. Then they are analyzed based on Empowerment theory by Mardikanto and Soebiato (2017). The study's result show that the empowerment emerged in three aspects namely human, business, and institutional development. It is also found that the empowerment process is still not optimal due to several obstacles namely lack of awareness of fishermen group, characteristics of the archipelago, and inadequate communication network. To overcome these, the Fishery Department has made efforts such as giving training, distributing fishing gears, and establishing certain fishermen groups. Suggestions given by the authors are giving self-awareness

and work ethics socialization, cooperating with the heads of village, and issuing local government regulation regarding fishery.

Keywords: *Empowerment, Fishermen Group, Integrated Marine and Fisheries Center Program*

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu negara kepulauan yang didominasi oleh lautan, Indonesia memiliki potensi besar di bidang perikanan dan kelautan. Potensi perikanan dan kelautan ini berperan penting dan strategis bagi pembangunan nasional Indonesia, karena memengaruhi banyak aspek seperti ekonomi, keamanan, ekologi dan sosial. Selain itu, dampak langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan dan kelautan.

Di negara Indonesia sebagian besar masyarakat yang hidup di wilayah pesisir menggantungkan kehidupannya pada hasil laut. Dengan kata lain apabila masyarakat tidak bekerja di bidang lain, maka mereka mengandalkan sektor kelautan maupun perikanan sebagai mata pencahariannya.

Potensi kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia, apabila telah diatur dan dikelola secara baik, harapannya dapat membantu masyarakat nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Namun, berdasarkan data hasil Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 diketahui bahwa nelayan termasuk salah satu profesi paling miskin di Indonesia. Sebanyak 11,34% orang di sektor perikanan tergolong miskin. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor pelayanan restoran yaitu 5,56%, konstruksi bangunan di angka 9,86%, serta pengelolaan sampah dengan persentase 9,62% (Anna, 2020).

Penyebab kemiskinan nelayan sendiri di antaranya sumber daya manusia yang masih kurang berkualitas, kekurangan atau keterbatasan modal usaha, teknologi hasil tangkapan yang cenderung masih tradisional, keterbatasan kapasitas dan sumber daya pengelola, kondisi alam dan perubahan musim yang tidak pasti memaksa nelayan untuk tidak melaut sepanjang tahun sehingga menyebabkan hasil tangkapan yang tidak konsisten dan mengganggu pendapatan nelayan (Hamdani & Wulandari, 2013; Listyawati, 2016).

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan kabupaten yang sangat kaya akan sumber daya alam di sektor perikanan. Hal ini ditunjang oleh letak geografis yang cukup strategis dengan batas-batas wilayah yaitu:

Sebelah Utara : Laut Banda

Sebelah Selatan: Laut Timor dan Selat Wetar

Sebelah Barat : Kepulauan Alor

SebelahTimur : Kepulauan Tanimbar

Dari 72.427 km² luas wilayah Kabupaten MBD, 88,06% wilayahnya berupa lautan. Selain itu, letaknya yang berada di bentang Laut Sunda-Banda, Kabupaten MBD menjadi salah satu kawasan utama untuk konservasi dan pengelolaan perikanan dan kelautan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, sebagai daerah yang berada pada segitiga terumbu karang, laut di Kabupaten MBD termasuk laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Kajian tentang pemberdayaan nelayan di Indonesia telah banyak dilakukan. Misalnya penelitian mengenai usaha pemberdayaan masyarakat nelayan dan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan tersebut (Abidin As, 2019). Pemberdayaan masyarakat pesisir juga dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (Desmiyawati dkk., 2015). Selain itu, pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilakukan melalui penerapan metode, program, maupun model pemberdayaan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir (Gai, 2020; Nugroho, 2015; Rahmanto & Purwaningsih, 2016; Sitompul, 2015).

Kajian tentang pemberdayaan juga tidak terbatas pada upaya maupun penerapan suatu model pemberdayaan. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Syafrini pada tahun 2014 yang memfokuskan pada ketergantungan nelayan terhadap rentenir (Syafrini, 2014). Di sisi lain gender juga memegang peranan dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan (Handajani dkk., 2016).

Tentu saja, hasil-hasil penelitian ini telah memberikan sumbangan keilmuan terkait pemberdayaan masyarakat nelayan dan permasalahannya di Indonesia. Akan tetapi, dari literatur yang tersedia sebelumnya, kajian mengenai cara atau usaha memberdayakan masyarakat nelayan pesisir melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) tampaknya masih cukup jarang dilakukan.

Dari latar belakang di atas, di dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis pemberdayaan kelompok nelayan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten MBD dan menganalisis kendala serta usaha dinas terkait dalam mengatasi kendala tersebut.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan

Kata “pemberdayaan” dalam bahasa Inggris yaitu “*empowerment*” dan dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan”. Hal ini merujuk pada pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*) (Anwar, 2018). Pemberdayaan dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan sehingga memiliki kekuatan untuk hidup secara mandiri (Hamid, 2018; Mardikanto & Soebiato, 2017; Suharto, 2017). Pemberdayaan sendiri memiliki tujuan yang meliputi berbagai perbaikan sebagaimana dinyatakan oleh Suharto (2017, hlm. 47):

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*), merujuk pada penumbuhan semangat belajar sepanjang hidup.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), artinya dengan semangat belajar sepanjang hidup, masyarakat diharapkan akan memiliki lebih banyak akses terhadap sumber daya.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*), bermakna bahwa jika pendidikan dan akses sudah lebih baik, maka diharapkan tindakan-tindakan pun semakin baik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*), harapannya setelah tindakan membaik, maka secara kelembagaan pun akan menjadi baik.
- 5) Perbaikan usaha (*better business*), berarti adanya perbaikan pendidikan, aksesibilitas, kelembagaan maka diharapkan dapat memperbaiki usaha yang dilakukan.
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*), adanya perbaikan usaha diharapkan dapat pula memperbaiki pendapatan.
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*) berarti perbaikan pendapatan diharapkan dapat diikuti oleh perbaikan lingkungan (fisik dan sosial).
- 8) Perbaikan kehidupan (*better living*), dengan tingkatan pendapatan dan keadaan lingkungan yang semakin meningkat, keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat menjadi lebih baik
- 9) Perbaikan masyarakat (*better community*) merupakan muara semua perbaikan yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Selanjutnya terkait dengan pemberdayaan ada empat hal pokok dalam pemberdayaan yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan dengan lingkup sebagai berikut (Mardikanto & Soebiato, 2017, hlm. 114–116):

- 1) Bina Manusia, merupakan usaha awal dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya bina manusia terdapat beberapa kegiatan pengembangan kapasitas, yaitu:
 - a) Pengembangan kapasitas individu (kepribadian, kompetensi kerja, dan profesionalitas).
 - b) Pengembangan kapasitas kelembagaan (kejelasan visi, misi, budaya organisasi, dan semua komponen dalam organisasi).
 - c) Pengembangan kapasitas sistem jejaring (pengembangan interaksi organisasi secara internal dan eksternal).
- 2) Bina Usaha, memberikan dampak yang baik pada perbaikan ekonomi untuk masyarakat miskin. Adapun kegiatan pemberdayaan di dalam bina usaha yaitu: pemilihan komoditas

dan jenis usaha; perencanaan usaha; pembentukan badan usaha; investasi; pengembangan SDM; pengelolaan produksi; pengelolaan finansial; pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis; pengembangan jejaring dan kemitraan; dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

- 3) Bina Lingkungan, berkaitan dengan pemenuhan syarat AMDAL (Analisis Manfaat dan Dampak Lingkungan).
- 4) Bina Kelembagaan, mempunyai arti luas yang merupakan bentuk relasi sosial yang memiliki empat komponen, yaitu:
 - a) *Person*, yaitu aktor yang terlibat di dalam suatu kelembagaan.
 - b) Kepentingan, yaitu orang-orang yang terikat oleh satu tujuan.
 - c) Aturan, yaitu kesepakatan yang dibuat bersama.
 - d) Struktur, yaitu posisi dan peran yang harus dijalankan secara benar.

2. Masyarakat

Paul B. Horton dan C. Hunt dalam Bahua (2018, hlm. 10) menyatakan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, mendiami suatu wilayah dalam waktu yang cukup lama sehingga mereka mengembangkan kebudayaan yang sama pula. Masyarakat adalah kumpulan orang yang relatif mandiri dan hidup berkelompok di suatu lingkungan, hidup secara bersama-sama dan diatur oleh suatu pemimpin. Hal ini didukung oleh pendapat Suharto (2017, hlm. 47) yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang, umumnya berada di wilayah yang sama, yang saling menyatu dengan identitas dan kepentingan yang sama serta memiliki perasaan saling memiliki.

Di dalam menjalankan kehidupan bersama, masyarakat menjalankan sejumlah fungsi, di antaranya: sebagai penyedia dan distributor barang-barang dan jasa; tempat kegiatan bisnis dan pekerjaan; keamanan publik; sosialisasi; wadah dukungan bersama atau gotong royong; kontrol sosial; dan organisasi partai politik.

Masyarakat nelayan sebagai bagian masyarakat Indonesia, hidup dengan mengelola potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada (Nuryanto & Haryono, 2017) serta memiliki karakteristik jenis usaha seperti usaha penangkapan ikan di laut, pengolahan hasil perikanan, pertambakan dan usaha jasa lainnya yang ada di sekitarnya (Sabarisman, 2017). Masyarakat nelayan juga dapat dikatakan sebagai masyarakat pesisir yang memiliki karakteristik dinamis sumber daya yang digarapnya. Konsekuensinya, untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, para nelayan harus hidup berpindah-pindah (Fatmasari, 2014).

Lebih lanjut mengenai karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir, Fatmasari (2014) menyatakan bahwa umumnya masyarakat pesisir memiliki usaha di sektor kelautan seperti menjadi nelayan, pembudidaya ikan, penambang pasir dan pelaku transportasi laut.

Karakteristik lainnya yaitu mereka secara ekonomi, sosial (akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural relatif tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Manggabarani (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan nelayan masih tergolong minim yaitu memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp 450.000,00–Rp 500.000,00 per bulan.

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian nelayan itu sendiri melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian yang berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada (Sitompul, 2015).

Seperti halnya pemberdayaan masyarakat secara umum, pemberdayaan masyarakat nelayan juga dapat dilakukan secara individu dan kelompok. Pemberdayaan secara individu menyangkut upaya menciptakan suatu lingkungan yang mampu membangkitkan dan memberi motivasi kepada setiap individu agar mampu mendirikan kemampuan dirinya untuk dapat memanfaatkan sumber daya tersedia. Adapun pemberdayaan secara kelompok, berkenaan dengan pemberian kekuatan atau memberdayakan sumber daya waktu, keterampilan, dan modal ekonomi yang dimiliki oleh kelompok nelayan tersebut.

3. Program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)

Hadirnya program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan perwujudan Nawa Cita ketiga sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini dititikberatkan pada wilayah laut dan pulau-pulau kecil dengan tujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah dan desa.

Fokus pengembangan SKPT ini menurut Zamroni, dkk. (2019) meliputi empat hal yaitu: peningkatan nilai tambah hasil laut, peningkatan daya saing, modernisasi dan korporatisasi usaha hasil laut, dan penguatan produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Tujuan dari SKPT sebagaimana tertuang dalam Kepmen KP No. 48 Tahun 2015 adalah untuk membangun dan mengintegrasikan proses bisnis perikanan berbasis kemasyarakatan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soejarwo, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa kegiatan usaha

perikanan dapat diteliti mulai dari infrastrukturnya, sarana dan prasarana, tata kelola kelembagaan, hingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikananannya.

Program dan kegiatan SKPT sebagaimana tertuang dalam Kepmen KP No. 48 Tahun 2015 adalah:

- 1) Pengelolaan Ruang Laut, di antaranya operasionalisasi sekretariat SKPT pusat dan daerah, pembangunan/revitalisasi infrastruktur dasar, ekowisata bahari terpadu, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- 2) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- 3) Perikanan Tangkap, misalnya pemberian bantuan kapal dan alat tangkap ikan, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pelabuhan, pemberian bantuan modal usaha, dan pendampingan operasional pelabuhan perikanan.
- 4) Perikanan Budidaya, misalnya memberikan bantuan prasarana dan sarana perikanan budidaya (benih, induk, pakan, keramba jaring apung), pemberian bantuan modal usaha, pendampingan pengelolaan Balai Benih Ikan.
- 5) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yaitu bantuan sistem rantai dingin, bantuan modal usaha, dan bantuan alat pemasaran hasil perikanan.
- 6) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 7) Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan, dengan pembangunan *Technopark*, penguatan kelembagaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, pelatihan teknis dan manajerial, dan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan untuk akses perbankan dan sumber pembiayaan lainnya.
- 8) Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 9) Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota: pembinaan dan pendampingan; dukungan penyediaan sarana dan prasarana; dan dukungan kebijakan dan regulasi.

III. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan (pesisir) melalui pendekatan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017, hlm. 35) dipakai ketika ingin mengetahui suatu variabel independen, baik hanya pada satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan antarvariabel maupun mencari hubungan dengan variabel lain. Adapun Nazir (2013, hlm. 4) menyatakan bahwa metode deskriptif digunakan ketika kita hendak meneliti kondisi suatu kelompok manusia, objek, situasi, sistem pemikiran, dan peristiwa yang sedang terjadi saat ini.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui *in-depth interview (semistructured interview)*, observasi (*moderate participation*), dan studi dokumentasi. Adapun sumber data penelitian atau informan yaitu Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya, Ketua Tim Pemberdayaan Program SKPT, Ketua Kelompok Nelayan, dan Masyarakat Nelayan. Data-data lain diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, tulisan angka, dan gambar yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok nelayan melalui program SKPT di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Sejalan dengan teknik pengumpulan data, maka instrumen penelitian yang dipakai yaitu pedoman wawancara, panduan observasi, dan daftar dokumen yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan selama 3 bulan mulai Desember 2020 sampai dengan Februari 2021.

IV. Hasil Dan Pembahasan

1. Deskripsi Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun program SKPT yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Barat Daya berbeda dengan yang lainnya. Program SKPT di MBD sepenuhnya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari Jepang. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten MBD Ibu Ariantje Gomies:

“Sejak tahun 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan MBD sebagai salah satu Kabupaten yang menjalankan Program SKPT, namun hal ini sedikit berbeda dengan daerah lain yang melaksanakan Program SKPT, karena anggaran Program SKPT di Kabupaten MBD bersumber dari dana hibah Jepang yang disalurkan dalam 2 fase untuk pembangunan infrastruktur di pelabuhan perikanan dan pasar ikan higienis di Tiakur”.

Penyaluran hibah tersebut akan dilaksanakan dalam 2 fase dengan durasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2023. Fase pertama hibah Jepang telah disalurkan kepada

KKP pada tahun 2018 dengan nilai ¥ 2,5 Milyar (Rp. 340 Milyar). Adapun fase kedua dibicarakan lebih lanjut pada tahun 2020. Pembangunan SKPT MBD sepenuhnya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran hibah JICA dengan nilai fase pertama sebesar Rp. 34.572.169.845 dan fase ke-2 sebesar Rp. 20.025.000.000.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soejarwo, dkk. (2019), program SKPT yang dilaksanakan di Pulau Moa dananya bersumber dari hibah JICA untuk mendukung SKPT sedangkan dukungan APBN digunakan untuk operasional dan teknis SKPT, bimbingan teknis pengelola SKPT dan nelayan, serta untuk pengadaan bantuan operasional.

2. Bina Manusia

Bina manusia adalah aspek utama dalam pemberdayaan masyarakat. Bina manusia merupakan hal pertama yang dilakukan karena tujuan dari pemberdayaan adalah perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan manusia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Bapak Djeky W. Laipiopa yang didapat saat penulis melaksanakan wawancara pada tanggal 03 Februari 2021 beliau mengatakan bahwa:

“Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan kelompok nelayan antara lain adalah: penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil, evaluasi dan pelaporan, pembinaan kelembagaan, penyusunan pedoman penyuluhan, menyusun juknis kerjasama usaha Hal ini telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan demi membentuk nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang lebih maju. Pemberdayaan yang dilaksanakan pun bukan hanya dilaksanakan oleh Dinas Perikanan namun adapun tenaga penyuluh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak Dinas telah melakukan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan maupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan harapan masyarakat setempat dapat mengembangkan potensi dibidang perikanan dan dapat menaikkan taraf hidup nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala seksi Kenelayan Bapak Gustaf Maupula yang mengatakan bahwa:

“Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya telah melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat setiap tahun. Namun upaya pemberdayaan ini kembali kepada masing-masing pribadi nelayan dalam menyikapi sosialisasi dan pelatihan yang diberikan.”

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan bukan hanya sekedar pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi, melainkan didukung dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana penunjang kepada kelompok-kelompok nelayan. Hal ini bertujuan agar masyarakat setempat dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mengembangkan usaha agar tidak selalu bergantung pada pemerintah, serta dapat meningkatkan *skill* bagi para nelayan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan, Bapak Djeky W. Laiopiopa, beliau mengatakan bahwa:

“Selain sosialisasi dan pelatihan Dinas Perikanan juga memberi bantuan sarana dan prasarana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya. Tujuannya untuk pembangunan fisik dan investasi jangka menengah. Bantuan ini juga untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten MBD. Jumlah paket bantuan yang diberikan khususnya di Letti, Moa, Lakor dan Kisar.”

Seluruh upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam aspek bina manusia yang sudah dijalankan, mengarah pada pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian, kompetensi kerja dan profesionalitas, kapasitas kelembagaan pengembangan kapasitas sistem jejaring. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepala seksi sarana penangkapan ikan yang mengatakan bahwa:

“Dinas Perikanan sangatlah peduli dengan kebutuhan atau sarana penangkapan ikan nelayan. Hal ini terbukti karena hampir setiap tahunnya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diutamakan untuk pengadaan sarana penangkapan ikan. Namun seringkali nelayan yang masih belum sadar untuk merawat dan memelihara sarana yang diberikan pemerintah.”

Hal ini pun berkaitan dengan hasil observasi penulis di lapangan. Penulis menemukan bahwa, sebagian besar nelayan di Maluku Barat Daya masih belum sadar dan belum mengerti dengan maksud dari pemberian sosialisasi dan pemberian bantuan yang diberikan pemerintah kepada nelayan. Hal ini terbukti karena banyak *speedboat* yang diberikan pemerintah tidak dipergunakan untuk mencari ikan melainkan digunakan nelayan untuk memuat penumpang yang ingin menyewa *speedboat* tersebut untuk berlayar dan bukan untuk kepentingan penangkapan ikan.

Hasil penelitian pada aspek bina manusia khususnya berkenaan dengan pelaksanaan sosialisasi dan pemberian bantuan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmanto & Purwaningsih (2016) yang menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Pulau Untung Jawa telah menerima bantuan dan pelatihan/penyuluhan dari instansi terkait. Penelitian oleh Hasanah (2019) juga mengemukakan bahwa penguatan kapasitas SDM telah

dilakukan oleh KUD Mina di Desa Kilensari untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu.

Senada dengan hasil penelitian penulis, dua hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa pemberian sosialisasi dan bantuan belum optimal baik dari sisi pemerataan maupun dari pemahaman nelayan itu sendiri.

3. Bina Usaha

Bina usaha merupakan salah satu dari empat upaya pokok dalam pemberdayaan. Bina usaha memberikan dampak yang baik pada perbaikan ekonomi untuk masyarakat miskin. Sejauh ini pelaksanaan bina usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan melalui bidang Kelembagaan dan Bina Usaha sesuai dengan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 26 Tahun 2017 adalah penataan dan pengembangan kelembagaan dan bina usaha perikanan, identifikasi potensi, perencanaan dan pengembangan permodalan serta investasi usaha perikanan, bimbingan teknis dan diversifikasi perikanan, sosialisasi, diseminasi teknologi, pengendalian mutu, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan bina usaha perikanan. Adapun kelompok yang merupakan sasaran utama kegiatan bina usaha yakni Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar).

KUB merupakan kelompok nelayan yang terbentuk dari hasil musyawarah. Terbentuknya KUB dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama untuk meningkatkan pendapatan anggota. KUB ini termasuk badan usaha nonbadan hukum. Adapun Poklahsar adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan secara berkelompok.

KUB dan Poklashar yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya pun belum dapat dikontrol secara baik oleh Dinas Perikanan karena data kelompok KUB dan Poklashar yang belum divalidasi oleh Dinas Perikanan sejak tahun 2020 kemarin hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya, beliau mengatakan bahwa:

“Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Pembudidaya Ikan, dan Kelompok Pengolah pemasar di MBD pada tahun 2019-2021 belum dapat tervalidasi secara keseluruhan karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan antara lain: wilayah MBD yang merupakan wilayah Kepulauan dan kelompok nelayan yang tidak menentu (kelompok nelayan yang dibuat hanya ketika ada bantuan). Hal ini menjadi kendala dalam penginputan data kelompok nelayan di Maluku Barat Daya.”

Menurut hasil observasi penulis di lapangan, data kelompok yang tidak valid pun menjadi kendala dalam pemasaran karena memengaruhi harga pasar terutama harga ikan yang tidak stabil akibat kurangnya pengontrolan dari Dinas Perikanan di bidang Bina Usaha. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tabel harga ikan menurut bulan di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016-2018.

Tabel 1.

Harga Ikan Menurut Bulan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2018

	Cakalang	Tongkol	Layang
Januari	19.163	35.786	27.235
Februari	24.798	35.786	27.689
Maret	27.667	39.771	27.954
April	32.701	39.813	33.112
Mei	32.701	37.813	33.112
Juni	34.456	32.904	33.726
Juli	32.751	32.904	27.272
Agustus	33.256	35.431	27.235
September	30.465	35.431	27.886
November	30.465	35.782	23.087
Desember	41.332	35.782	25.087
2018	31.167	36.085	28.264
2017	18.230	24.778	21.750
2016	15.950	13.500	20.038

Sumber: BPS Maluku Barat Daya, 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa harga ikan dalam bulan di Kabupaten Maluku Barat Daya dalam tahun 2016-2018 tidak stabil atau mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan yang beranggapan bahwa:

“Dinas Perikanan sangatlah sulit untuk mengontrol harga ikan segar yang dijual di pasar karena sangatlah sulit berkomunikasi dengan para pedagang di Kabupaten Maluku Barat Daya karena karakteristik wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan wilayah Kepulauan. Hal lain yang menjadi kendala adalah susahnya jaringan seluler yang menyebabkan komunikasi antara dinas perikanan dan pedagang ikan segar pun terputus.”

Proses bina usaha yang berlangsung di Kabupaten Maluku Barat Daya menurut hasil observasi penulis masih berjalan belum baik atau belum optimal. Hal ini ditandai karena kurang adanya pengontrolan yang baik dari Dinas Perikanan sehingga belum dapat mengontrol harga ikan segar. Pengontrolan yang belum maksimal menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang memiliki modal besar lebih mendominasi pasar. Pedagang-pedagang besar ini biasanya membeli ikan dalam jumlah banyak kemudian menjualnya

kembali dengan harga yang lebih mahal. Pedagang-pedagang yang memiliki modal besar ini biasanya penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya menyebutnya Papalele.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwandi & Prihatin (2020) menunjukkan hasil yang berbeda. Pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan yang dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudera dari aspek ekonomi telah memberikan hasil yang optimal yaitu adanya peningkatan kualitas kehidupan anggota dan keluarganya melalui aneka kegiatan kelompok yaitu *restocking* rajungan dan pengelolaan produk turunannya. Hal ini berbeda dengan kondisi di lokus penelitian penulis yang mana untuk harga ikan saja masih dikendalikan oleh kelompok tertentu.

4. Bina Lingkungan

Di dalam penelitian ini, untuk dimensi bina lingkungan, tidak ada temuan. Hal ini dikarenakan program SKPT di Kabupaten Maluku Barat Daya masih terbilang baru dan pemerintah masih berfokus pada pemberdayaan pada aspek bina manusia, bina usaha, dan bina kelembagaan.

5. Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan adalah salah satu aspek dari upaya pokok pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto. Bina kelembagaan memiliki arti sempit yakni lembaga atau institusi dan dalam arti luas adalah merupakan suatu relasi sosial. Sejauh ini bina kelembagaan yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya menurut hasil pengamatan di lapangan oleh penulis dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu bina kelembagaan internal dan eksternal.

1) Internal

Bina kelembagaan internal adalah upaya bina kelembagaan yang dilaksanakan dalam internal Dinas Perikanan. Upaya pembinaan ini dilaksanakan antara atasan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Perikanan memiliki bidang kelembagaan dan bina usaha didalamnya terdapat Seksi Bina Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya yang bertugas melakukan pembinaan baik secara Internal maupun eksternal.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 26 Tahun 2017 dapat dilihat proses pembinaan kelembagaan yang terjadi dapat dilaksanakan secara hierarki yakni dari Kepala Dinas kepada sekretaris dan berlanjut hingga pada staf di Dinas Perikanan. Hal ini terlihat dari tugas dan fungsi seksi Bina Kelembagaan yaitu: melakukan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan.

2) Eksternal

Bina kelembagaan eksternal adalah upaya bina kelembagaan yang dilakukan antara Dinas Perikanan dengan kelompok di luar Dinas Perikanan. Kelompok di luar dimaksudkan adalah kelompok nelayan dan pembudidaya yang merupakan sasaran utama adanya pembinaan kelembagaan oleh Dinas Perikanan. Nelayan dan pembudidaya yang dimaksudkan adalah nelayan dan pembudidaya yang tercatat resmi dalam data Dinas Perikanan.

Sejauh ini proses pembinaan kelembagaan sudah berjalan dengan baik. Upaya pemberdayaan dalam aspek bina kelembagaan menurut kepala seksi Bina Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Bapak Andre Pieris adalah:

“Upaya kelembagaan yang dilaksanakan kepada nelayan dan pembudidaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya adalah melaksanakan penyuluhan atau pelatihan kepada Nelayan dan pembudidaya, memberi bantuan perikanan kepada masyarakat atau kelompok nelayan, membentuk Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB, Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut Poklahsar, dan kelompok pembudidaya ikan kecil yang selanjutnya disingkat Pokdakan”.

Menurut data Dinas Perikanan, perubahan yang sangat besar pada jumlah nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Data Jumlah Kelompok Nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2020
Dinas Perikanan Maluku Barat Daya, 2021

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan
2016	415
2017	657
2018	149
2019	-
2020	150

Pada tahun 2018 terdapat pengurangan yang sangat besar karena banyak kelompok nelayan yang bubar. Menurut pendapat Kepala Seksi Bina Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya hal ini disebabkan oleh:

“Sebagian besar kelompok nelayan yang dibentuk oleh nelayan sendiri terbentuk karena adanya pemberian bantuan dari pemda maupun pemerintah pusat. Jadi kelompok-kelompok nelayan yang ada hanya dibentuk sekedar untuk menerima

bantuan, setelah bantuan itu diberikan kelompok-kelompok nelayan tersebut pun bubar atau tidak aktif lagi”.

Hal ini menyebabkan banyaknya kelompok nelayan yang terbentuk namun tidak dapat berfungsi secara efektif karena pemahaman masyarakat yang belum baik mengenai manfaat kelompok nelayan yang dibentuk. Orientasi masyarakat hanyalah pada bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah bukan pada tujuan pembentukan kelompok nelayan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Seksi Kenelayanan Bapak Oktovianus M Tetrapoik yang beranggapan bahwa:

“Banyak nelayan yang membentuk kelompok-kelompok hanya untuk memperoleh bantuan. Hal ini disebabkan karena sebagian besa bantuan yang diberikan pemerintah berupa paket bantuan untuk kelompok nelayan bukan untuk individu. Hal ini merupakan salah satu pemicu nelayan membentuk kelompok yang hanya bersifat sementara untuk mendapat bantuan.”

Namun dari hasil observasi penulis di lapangan penyebab bina kelembagaan ini tidak berjalan dengan baik bahkan sampai pada kelompok nelayan yang tidak permanen atau hanya sementara saja dibentuk disebabkan karena dua hal utama yaitu kurangnya pengontrolan dari Dinas Perikanan dan belum adanya payung hukum yang mengikat suatu kelompok nelayan dalam proses terbentuk maupun dibubarkan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hasanah (2019) hasilnya menunjukkan bahwa pembentukan unit usaha bersama adalah salah satu upaya mencapai kesejahteraan bersama. Senada dengan hasil penelitian penulis, pada penelitian terdahulu ini keberadaan koperasi atau kelompok usaha bersama belum optimal karena pemberdayaan berlangsung hanya ketika ada fasilitator saja.

V. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya terbagi atas tiga aspek yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Kelembagaan. Secara umum pelaksanaan pemberdayaan pada ketiga aspek tersebut belum optimal dikarenakan ditemukan berbagai kendala seperti masing-masing individu nelayan belum memiliki pemahaman dan kesadaran diri untuk dapat menindaklanjuti seluruh kegiatan pemberdayaan, masalah jaringan dan karakteristik wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan wilayah kepulauan yang tidak memungkinkan untuk

dilakukannya pengontrolan langsung secara rutin menyebabkan harga ikan dikendalikan oleh Papalele, dan banyak kelompok nelayan yang telah dibentuk namun pembentukan kelompok nelayan tersebut dapat dikatakan belum jelas dan tidak bertahan lama.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut seperti memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, pemberian bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan, melakukan pengontrolan harga jual ikan di pasaran, distribusi tugas dan fungsi kepada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidaya, dan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan).

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait pemberdayaan kelompok nelayan Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya perlu memberikan sosialisasi-sosialisasi pentingnya nelayan untuk meningkatkan kesadaran diri dan etos kerja dengan mendatangkan pelatih atau tenaga penyuluh berkualitas, sebaiknya dilakukan survei dan pengontrolan yang rutin tiap bulannya ke seluruh wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melaksanakan kerjasama antara Dinas Perikanan dengan seluruh kepala desa untuk mengontrol kelompok nelayan dan pedagang ikan, dan membuat peraturan yang mengatur pembentukan kelompok nelayan, penertiban Papalele, dan penggunaan bantuan penangkapan ikan agar proses pemberdayaan kelompok nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat terkontrol dan memiliki payung hukum yang tegas dan jelas.

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian rintisan terkait pemberdayaan kelompok nelayan melalui program SKPT, maka penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai implementasi program SKPT serta melihat pengaruh program ini tidak hanya pada dimensi pemberdayaan yang sudah dikaji dalam penelitian ini, tetapi dapat juga menyentuh dimensi bina lingkungan.

VI. Daftar Pustaka

- Abidin As, Z. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(2), 84–122. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95>
- Anwar, A. N. R. (2018). Implementasi Pemberdayaan Nelayan Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 18–27. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1483>
- Bahua, M. I. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat* (1 ed.). Ideas Publishing.
- Desmiyawati, D., Hasan, A., Samsir, S., & Azlina, N. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta Dan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10(2), 89–95.
- Fatmasari, D. (2014). Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 144–166. <https://doi.org/10.24235/amwal.v6i1.255.g225>
- Gai, A. M. (2020). Konsep Pemberdayaan Nelayan Pesisir Kota Surabaya Sebagai Bentuk Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Sustainable Livelihood. *Jurnal Planoearth*, 5(1), 45–51. <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.2153>
- Hamdani, H., & Wulandari, K. (2013). Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013 UNEJ*, 1–8.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Handajani, H., Relawati, R., & Handayanto, E. (2016). Peran Gender dalam Keluarga Nelayan Tradisional dan Implikasinya pada Model Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pesisir Malang Selatan. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.22219/jpa.v1i1.2745>
- Hasanah, U. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Kluster Ikan Di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *Acton*, 15(1), 55–86.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48 Tahun 2015 Tentang Tujuan dari Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. (2015).

Listyawati, A. (2016). Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(1), 61–70.

Manggabarani, I. (2016). Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan yang Bermukim di Pesisir Pantai (Studi Kasus Lingkungan Luwaor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene). *AGROVITAL*, 1(1), 27–33. <http://dx.doi.org/10.35329/agrovital.v1i1>

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Nugroho, M. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Di Wilayah Pesisir Pantai. *Teknologi Pangan : Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 6(1), 19–26. <https://doi.org/10.35891/tp.v6i1.464>

Nuryanto, N., & Haryono, H. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Melalui Koperasi Nelayan Dan E-Commerce. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 18(1), 49–63. <https://doi.org/10.33556/jstm.v0i1.157>

Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan. (2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan-Ikan Kecil. (2015).

Rahmanto, D., & Purwaningsih, E. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untung Jawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kemandirian Nelayan. *Adil: Jurnal Hukum*, 7(1), 111–125. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.335>

Sabarisman, M. (2017). Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir. *Sosio Informa*, 3(3), 216–235. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.707>

Sitompul, N. R. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Silo Baru Melalui Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 267–288. <https://doi.org/10.31113/jia.v12i2.84>

Soejarwo, P. A., Muawanah, U., & Indah Yanti, B. V. (2019). Analisis Kesiapan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (skpt) Pulau Moa Sebagai Sentra Perikanan Di Maluku Barat Daya. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 5(2), 105–114. <https://doi.org/10.15578/marina.v5i2.8084>

Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2017). *Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.

Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020). Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” di Jepara, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 231–251. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.9451>

Syafrini, D. (2014). Nelayan Vs Rentenir: Studi Ketergantungan Nelayan Terhadap Rentenir Pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 67–74. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i2.99>

Zamroni, A., Suryawati, S. H., Ramadhan, A., & Koeshendrajana, S. (2019). Fishery Industry Development in Morotai Island Regency: A Scientific Concept for Integrated Economics Model. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 9(1), 15–34. <https://doi.org/10.33512/jpk.v9i1.7071>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).